

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP DISCRETIONARY ACCRUALS PADA EMITEN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Makhdalena
gelatik14@yahoo.co.id
FKIP Universitas Riau

ABSTRACT

In the late 2000s, the bankruptcy of giant corporations was due to accounting manipulation or called as discretionary accruals, has made accounting experts increasing attention to corporate governance that consist of (1) board of directors and (2) audit committee. This study purposes to obtain clarity empirical from the influence of its corporate governance to discretionary accruals. The population of this research is the banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange as many as 31 companies and has been scrutinized. Mean while, the collection of data method use secondary data which obtained through each company's annual report and whereas the data anlysis method uses path analysis with SPSS. As a reseach result, this study found influences of corporate governance, that are (1) board of directors and (2) audit committee on discretionary accruals either simultaneously or partially in the banking sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange has proven to be exist and working effectively.

Keywords: Corporate Governance, Boards of Directors, Audit Committee, and Discretionary Accruals, Agents.

ABSTRAK

Kebangkrutan perusahaan raksasa di tahun 2000an akibat manipulasi akuntansi (akrual diskresioner) telah membuat ahli akuntansi meningkatkan perhatian terhadap tata kelola perusahaan (dewan direksi dan komite audit). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kejelasan secara empiris pengaruh *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) terhadap akrual diskresioner. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 31 perusahaan dan semuanya diteliti. Data variabel penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi (laporan tahunan). Sebagai metode analisis data dalam penelitian digunakan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) baik secara simultan maupun parsial terhadap akrual diskresioner pada perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berarti bahwa *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) yang ada di perusahaan pada sektor perbankan tercatat di Bursa Efek Indonesia telah bekerja secara efektif.

Kata kunci: Akrual Diskresionari, Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Manajemen

PENDAHULUAN

Bangkrutnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada akhir tahun 2000an seperti *Peregrine Investment, Ltd* di Hongkong; *Baring Futures* di Singapore; *Enron Corporation Consesco*; *Global Crossing*; *World Com* dan *Tyco* di Amerika Serikat; *HIH*

Insurance, Ltd dan perusahaan telekomunikasi *One-Tell, Ltd* di Australia; *Maxwell Communication Corporation* dan *Mirror Group Newspaper* di Inggris yang telah merugikan pemegang saham, kreditur, perusahaan pemasok dan karyawan perusahaan di-

sebabkan adanya manipulasi akuntansi pada perusahaan tersebut.

Menurut Cheung (2004); Owen (2003); Jill dan Solomon (2003) manipulasi akuntansi terjadi karena lemahnya *corporate governance* perusahaan hampir di semua aspek. Keberadaan Dewan Komisaris tidak berfungsi dengan baik dan tidak ada prosedur “*check and balance*” dalam operasi bisnis perusahaan. Disamping itu juga terdapatnya fungsi ganda terhadap jabatan penting, yakni jabatan *Chairman dan Chief Executive Officer (CEO)* yang diduduki oleh satu orang saja serta tidak efektifnya Komite Audit pada perusahaan tersebut. Peranan Dewan Komisaris terlalu lemah, mereka tidak independen. Begitu juga dengan Komite Audit yang tidak pernah mengarahkan eksternal auditor dalam melaksanakan tugas untuk bersikap independen dari pengaruh manajemen perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “*Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Discretionary Accrual pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun secara partial*”

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah melihat kejelasan pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun secara partial.

TINJAUAN TEORETIS

Discretionary Accruals

Manajemen (*agent*) adalah *self-interested* dan merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai akses langsung dan kapanpun terhadap informasi akuntansi yang berguna baik oleh manajemen sendiri maupun oleh pihak luar. Dan sebagai manusia yang *self-interested*, tidak tertutup kemungkinan bagi manajemen untuk meningkatkan kemakmurannya dengan merekayasa informasi yang diberikannya ke-

pada pihak luar. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak dari pada *principal*. Untuk meningkatkan kemakmurannya, ada alasan untuk percaya bahwa *agent* akan melakukan manipulasi dalam laporannya. Manipulasi yang dilakukan oleh *agent* bertujuan agar perbuatan yang dilakukan *agent* meningkatkan kemakmurannya dengan mengorbankan kemakmuran *principal* dan tidak dapat diketahui oleh *principal*.

Perilaku *agent* untuk memanipulasi laporan keuangan biasanya dilakukan dengan *discretionary accruals proxy* dari *earnings management*. *Earnings Management* adalah intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi dengan membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan (Scott, 2006).

Faktor-faktor yang memotivasi manajer untuk melakukan *discretionary accruals* yaitu, karena adanya motivasi bonus (*bonus purposes*), motivasi kontrak (*contractual motivation*), motivasi pajak (*taxes motivation*), perubahan CEO (*changes of CEO*) dan mengkomunikasikan informasi ke investor (*to communicate information*) (Scott, 2006). Terdapat empat pola *discretionary accruals* yang dapat digunakan oleh manajer, yaitu: (1) *taking a bath*, (2) *income minimization*, (3) *income maximization* dan (4) *income smoothing* (Scott, 2006).

Discretionary accruals yang timbul akibat *agency problem*, ini dapat diminimalisasi dengan keberadaan dewan komisaris dan komite audit yang efektif (Makhdalena, 2012b; Messier *et al.*, 2006; Boynton *et al.*, 2006; Sawyer *et al.*, 2005; Peasnell *et al.*, 2004; Xie *et al.*, 2003; Klein, 2002; Chtourou *et al.*, 2001; Lorsch, 2000).

Dewan Komisaris

Organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama oleh para anggotanya dan tidak mungkin semua anggota turut serta mengurus organisasi, maka dibentuk badan yang mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut, yang dikenal dengan pengurus (Moenaf, 2000).

Pengurus merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa anggota dan secara kolektif melakukan fungsi kepengurusan. Kepengurusan organisasi dapat dilakukan oleh suatu kepemimpinan bersama oleh beberapa orang (*plural management*) atau dilakukan oleh kepemimpinan tunggal, yaitu hanya ada direktur yang mengetuai pengurus. Demikian pula pada suatu perseroan, tidak mungkin semua pesero maupun anggota turut serta dalam pengurusan, maka perlu dibentuk suatu badan yang melaksanakan kepengurusan yang dibuat oleh para pesero untuk melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan ini diemban oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap yang menjalankan kegiatan atau manajemen (Moenaf, 2000).

Konsep dasar dewan komisaris berasal dari tanggung jawab pengaturan (*governance*) suatu badan usaha yang dimiliki oleh kelompok yang berbeda dengan yang mengelola. Pengarahan (*governance*) merupakan fungsi yang dilakukan oleh dewan komisaris (*board of directors*) dan tidak sama dengan tugas dewan pengelola/manajemen (*board of executive/executive committee*). Dimana pengaturan menyangkut masalah pemberian pengarahan untuk dilaksanakan dan pengawasan, sedangkan pengelolaan adalah melaksanakan pengarahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengarahan yang dimaksud adalah memberikan pengarahan (*directing*) dalam rangka melaksanakan fungsinya atau yang biasa disebut *director*, berbeda dengan yang mengelola

(*managing*) yang dilakukan oleh manajer (Moenaf, 2000).

Anggota dewan komisaris sebaiknya terdiri lebih banyak anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar anggota dewan dapat lebih independen dalam mengawasi manajemen (Lorsch, 2000). Dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, dewan komisaris sebaiknya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman dalam masalah bisnis perusahaan, yakni dengan memahami strategi perusahaan, kebijakan perseroan dan rencana jangka panjang dan daya saing perusahaan. Di samping itu memahami masalah keuangan perusahaan, investasi dan divestasi, merger, pasar modal, termasuk membaca laporan keuangan dan pangsa pasar serta perkembangan ekonomi, indikator ekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Juga perlu bagi dewan komisaris untuk memahami politik nasional dan perburuhan serta kemampuan untuk melakukan *lobbying* dan *public relations*. Pemahaman terhadap perundang-undangan secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan, etika usaha dan hal lain yang tidak langsung mempengaruhi perusahaan yang juga tidak kalah pentingnya (Moenaf, 2000).

Diharapkan dewan komisaris dapat berfungsi dengan baik dalam perusahaan. Agar dewan komisaris dapat berfungsi dengan baik, maka komposisi dewan komisaris harus diperhatikan serta harus memiliki komisaris independen. Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT BEJ No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komposisi dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. Jumlah dewan komisaris harus optimal, tidak boleh sedikit dan atau berlebihan serta harus heterogen agar bisa saling mengisi. Disamping komposisi dewan komisaris, karakteristik dewan komisaris yang memiliki pengetahuan, *skill* dan pengalaman dalam mengelola sumber daya perusahaan serta memiliki wawasan yang luas dan berorientasi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki juga sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan (Xie *et al.*, 2003).

Salah satu fungsi kunci dewan komisaris adalah meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi, mencakup audit independen dan sistem *internal control* yang tepat berjalan, khususnya sistem pemantauan risiko, pengendalian keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (OECD, 2004).

Komite Audit

Komite Audit adalah subkomite dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Messier *et al.*, 2006). Keberadaan komite audit sangat diperlukan dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang telah *go public* (SOA, 2002; Sawyer *et al.*, 2005; Bapepam, 2003).

Dewan direksi telah meningkatkan pengakuan terhadap nilai komite audit sebagai instrumen pengendalian dan sebagai alat untuk memperbaiki kualitas praktik pelaporan keuangan (Sawyer *et al.*, 2005).

Keharusan membentuk komite audit pada perusahaan yang *go public* dinyatakan dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 Tanggal 5 Mei 2000 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06/2000 yang mewajibkan semua perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit. Ketentuan mengenai Komite Audit pada perusahaan yang *listed* di BEJ telah ditegaskan kembali oleh Bapepam dengan Surat

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 Tanggal 22 Desember 2003 mengenai Kewajiban Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Peraturan Nomor IX.1.5) yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-29/PM/2004 Tanggal 24 September 2004.

SOA (2002) menentukan komposisi komite audit dengan jumlah anggota lima orang yang diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Seluruh anggota komite audit harus berasal dari dewan komisaris dan harus independen. Anggota komite audit harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua dari kelima orang anggota komite audit harus memiliki pengalaman pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota komite audit lainnya bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang anggota komite audit mantan akuntan publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota komite audit harus bekerja penuh di perusahaan yang mengangkat mereka. Ketua dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun (Aldrige, 2005).

Ketentuan jumlah anggota komite audit bagi emiten BEI di atur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 menyebutkan bahwa keanggotaan komite audit adalah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Tanggungjawab utama komite audit adalah membantu dewan direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi,

internal control dan praktik pelaporan keuangan dari organisasi (Sawyer *et al.*, 2005). Sedangkan berdasarkan FCGI (2001) menyatakan bahwa Komite Audit memiliki tiga tanggung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu: (1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*); (2) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*); (3) Pengendalian Perusahaan (*Corporate Control*). Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kompetensi dalam memenuhi fungsi maupun kinerja. Kompetensi Komite Audit adalah setiap anggota Komite Audit harus independen (*independent*); salah satu anggota Komite Audit harus mempunyai pengalaman bidang keuangan (*financial expert*) serta memahami fungsi Komite Audit (*an understanding of audit committee functions*). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Independen; (2) Mempunyai pengalaman bidang keuangan, dimana di dalam Anggota Komite Audit paling sedikit atau setidaknya satu orang harus memiliki pengalaman di bidang keuangan; (3) Memahami fungsi dan peran Komite Audit dan (4) Jumlah dan lamanya rapat yang dilakukan dengan Auditor Internal (Sawyer *et al.*, 2005),

Adapun karakteristik dari komposisi komite audit adalah sebagai berikut: (1) anggota komite audit sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris; (2) anggota komite audit terdiri dari komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan (3) paling sedikit satu orang dari anggota komite audit harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (FCGI, 2003; Krishnan, 2005).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Discretionary Accruals*

Seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas dan tantangan perusahaan, komisaris yang berasal dari dalam perusahaan memiliki banyak kekurangan tidak saja karena faktor rendahnya derajat independensinya tetapi juga didorong oleh

faktor keterbatasan kualitas individu komisaris internal, seperti: *lack of skills, knowledge* dan *information* (Syakhroza, 2004). Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, model *good corporate governance* mewajibkan adanya keberadaan komisaris independen.

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi PT BEJ No. 315/BEJ/06/2000 perusahaan tercatat wajib memiliki jumlah komisaris independen minimum 30% dari jumlah anggota komisaris. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) perusahaan tercatat, wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *monitoring* yang efektif atas masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul antara manajemen dan pemegang saham. Bukti-bukti penelitian empiris yang ada saat ini mengenai dewan komisaris dan *discretionary accruals* dapat kita lihat pada uraian berikut.

Dewan komisaris sebaiknya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman mengenai masalah keuangan perusahaan, termasuk membaca laporan keuangan (Moenaf, 2000) dan salah satu fungsi kunci dewan komisaris harus dapat meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi (OECD, 2004). Komposisi Anggota dewan komisaris sebaiknya lebih banyak anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar dapat lebih independen dalam hal pengawasan terhadap manajemen (Lorsch, 2000).

Rezaei dan Roshani (2012) membuktikan bahwa proporsi anggota komisaris independen dapat mempengaruhi *discretionary accruals*. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Cornett *et al.* (2009) menemukan bahwa komisaris independen berhubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Hasil yang sama juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prencipe dan Yosef (2011) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *earnings management*. Mohamad *et al.* (2012) menemukan bukti bahwa *meeting* yang dilakukan dewan dengan CEO memiliki hubungan negatif dengan aktivitas *earnings management*. Selanjutnya hasil penelitian Liu dan Lu (2007) menemukan bukti bahwa komisaris independen berhubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Penelitian yang dilakukan oleh Klein (2002) yang menguji hubungan antara *discretionary accruals* dengan karakteristik *board of directors* menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi *board of directors* dengan *discretionary accruals*. Pada penelitian Klein (2002), juga membuktikan bahwa struktur dewan yang lebih independen dari CEO lebih efektif memonitoring proses pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Peasnell *et al.* (2000) menunjukkan bahwa proporsi *outside director* berpengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*. Dan Makhdalena (2012a) juga menguji hubungan proporsi komisaris independen dengan *discretionary accruals* pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Jakarta serta menyimpulkan bahwa komisaris independen terdapat hubungan yang tidak signifikan dengan *discretionary accruals*. Di samping itu, Makhdalena (2012b) juga menguji pengaruh proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit terhadap *discretionary accruals* pada perusahaan konglomerasi yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen dan komposisi komite audit secara simultan, memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* sedangkan secara parsial, proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *discretionary accruals* sementara

komposisi komite audit berpengaruh terhadap *discretionary accruals*.

Chtourou *et al.* (2001) yang menemukan bukti bahwa peran dewan komisaris berhubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Menurut Chtourou *et al.* (2001) jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman dapat mengurangi *discretionary accruals*. Peasnell *et al.* (2004) menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, dewan komisaris merupakan bagian yang penting dari proses pelaporan keuangan. Timbulnya *earnings management* pada perusahaan yang terdapat di *United Kingdom* tergantung pada *monitoring* yang dilakukan oleh dewan. Peasnell *et al.* (2004) menemukan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi *outsider director* tinggi berhubungan dengan menurunnya *income-increasing*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Discretionary Accruals*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Komite audit merupakan subkomite dari dewan komisaris yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (Messier *et al.*, 2006). Komite audit memiliki dampak besar terhadap *discretionary accruals*. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah independensi komite dari manajemen dan pengalaman anggota. Komite audit yang hanya terdiri dari dewan yang berasal dari luar perusahaan dan anggota yang berpengalaman dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan suatu perusahaan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kesalahan pelaporan keuangan (Boynton *et al.*, 2006). Dewan direksi telah meningkatkan pengakuan terhadap nilai komite audit sebagai instrumen pengendalian dan sebagai alat untuk memperbaiki kualitas praktik pelaporan keuangan (Sawyer *et al.*, 2005). Adapun Komite Audit memiliki tiga tanggung jawab kepada Dewan Komisaris yaitu (1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*); (2) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate*

Governance); (3) Pengendalian Perusahaan (Corporate Control) (FCGI, 2001).

Chtourou *et al.* (2001) menemukan bukti bahwa beberapa praktik *corporate governance* (komite audit dan dewan komisaris independen) dapat mengurangi *discretionary accruals*. Menurut Chtourou *et al.* (2001) jumlah anggota komite audit yang independen dan yang melakukan pertemuan lebih dari dua kali setahun memiliki hubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Penelitian Xie (2003) menyimpulkan bahwa latar belakang keuangan; frekuensi pertemuan; aktivitas dan pengalaman keuangan dari anggota komite audit merupakan faktor penting yang dapat menghambat *discretionary accruals*. Selanjutnya Klein (2002) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara *audit committee independence* dengan *discretionary accruals*. Krishnan (2005) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dari komite audit memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan mereka dalam

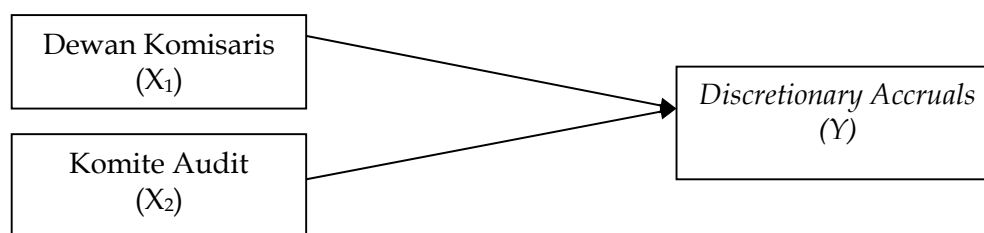
menyelesaikan masalah *internal control* yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Braiotta dan Zhou (2006) menyimpulkan bahwa pengalaman dari komite audit berhubungan negatif dengan *earnings management (discretionary accruals)*. Makhdalena (2011) menguji hubungan komposisi komite audit dengan *discretionary accruals* pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Jakarta yang menemukan bukti bahwa komposisi komite audit berhubungan dengan *discretionary accruals* tetapi tidak signifikan.

Selanjutnya rerangka pemikiran penelitian ini terlihat pada Gambar 1.

Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan teori, maka hipotesis penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap *discretionary accruals* baik secara simultan maupun secara parsial.



Sumber: Analisis Penulis

Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Dewan Komisaris (X_1), Komite Audit (X_2) dan *Discretionary Accrual* (Y). Dewan komisaris (X_1) adalah wakil dari pemegang saham yang bertanggung jawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen, dengan indikator sebagai berikut: (1) *size*, jumlah anggota dewan; (2) *independence*, persentase komisaris inde-

penden; (3) *competence*, masa kerja komisaris independen. Komite Audit (X_2) adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris, dengan indikator sebagai berikut: (1) *size*; (2) *independence*; (3) *expertise*, jumlah komite audit yang merupakan ahli keuangan; (4) *meeting*, frekuensi *meeting* komite audit. *Discretionary Accrual* (Y) adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu yang

dihitung menggunakan *Modified Jones' Model*.

Populasi penelitian ini adalah emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 31 perusahaan (ICMD, 2011) dan semua diteliti. Data mengenai variabel penelitian diperoleh dari *Annual Report* 2011 yang telah diaudit dan telah

diserahkan ke Bapepam dan BEI. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Path Analysis* dengan bantuan paket program SPSS. Adapun secara rinci operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Dewan Komisaris (X_1)	Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang bertanggung jawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen	1) <i>Size</i> 2) <i>Independence</i> 3) <i>Competence</i>	Rasio
Komite Audit (X_2)	Komite Audit adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris	1) <i>Independence</i> ; <i>competence</i> 2) <i>Expertise</i> 3) <i>Meeting</i>	Rasio
<i>Discretionary Accruals</i> (Y)	Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu	<i>Modified Jones' Model</i>	Rasio

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 2
Indeks *Discretionary Accrual* pada Emiten Sektor Perbankan Bursa Efek Indonesia

Indeks <i>Discretionary Accruals</i>	Jumlah	Persentase
Rata-rata	0,04411	-
Dibawah rata-rata	14 perusahaan	45%
Diatas rata-rata	17 perusahaan	55%

Sumber: Data Sekunder (diolah)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel *Discretionary Accruals* (Y)

Discretionary Accruals merupakan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk tujuan tertentu yang dihitung dengan menggunakan *Modified Jones' Model*.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata indeks *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek

Indonesia (BEI) yaitu sebesar 0,04411 artinya dari semua perusahaan sektor perbankan yang *listing* di BEI dapat dikatakan melakukan *discretionary accruals*. Sementara jumlah emiten sektor perbankan yang memiliki nilai indeks *discretionary accruals* di bawah rata-rata yaitu di bawah 0,04411 adalah sebanyak 14 perusahaan atau 45% dan kemudian sisanya memiliki indeks *discretionary accruals* di atas rata-rata, yaitu

sebanyak 17 perusahaan atau 55%. Walaupun semua emiten sektor perbankan di BEI melakukan *discretionary accruals*, tetapi indeksnya sudah mendekati nol yaitu 0,04411.

Analisis Deskriptif Variabel Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang bertanggung jawab mengatur dan memberikan pengarahan kepada manajemen yang diukur dengan 3 indikator, yaitu *size*; *independence* dan *competence*.

Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa emiten sektor perbankan di BEI rata-rata memiliki jumlah dewan komisaris 5 orang, dengan jumlah minimum 3 orang dan maksimum 9 orang. Dan yang memiliki jumlah dewan komisaris di atas rata-rata ada sebanyak 38,7% sedangkan di bawah rata-rata sebanyak 61,3%. Persentase komisaris independen rata-rata 57,5% dan di atas rata-rata ada sebanyak 45,2% serta di bawah rata-rata sebanyak 54,8%. Keberadaan komisaris independen minimal memiliki 50% dan

maksimal 80%. Dan untuk indikator *competence*, minimal telah bekerja satu tahun sedangkan maksimal adalah 8 tahun dan rata-rata 4,42 tahun sedangkan di atas rata-rata ada 41,9% dan di bawah rata-rata ada sebanyak 58,1%.

Tabel 3 menunjukkan bahwa emiten sektor perbankan di BEI semuanya telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Keputusan Direksi Bursa Efek No. 315/BEJ/06/2000, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Analisis Deskriptif Variabel Komite Audit

Komite Audit adalah sekelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris diukur dengan empat indikator, yaitu: *size*, *independence*, *expertise (financial)* dan *activity*.

Tabel 3
Dewan Komisaris

Indikator	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Diatas Rata-rata	Dibawah Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Size</i>	3 orang	9 orang	5 orang	38,7%	61,3%	1,72
<i>Independence</i>	50%	80%	57,5%	45,2%	54,8%	8%
<i>Competence</i>	1 tahun	8 tahun	4,42 tahun	41,9%	58,1%	1,93 tahun

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Tabel 4
Komite Audit

Indikator	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Diatas Rata-rata	Dibawah Rata-rata
<i>Size</i>	3 orang	6 orang	4 orang	48,40%	51,61%
<i>Independence</i>	60%	100%	93,23%	71%	29%
<i>Expert</i>	2 orang	6 orang	3 orang	32,26%	67,74%
<i>Meeting</i>	1 x	37 x	12 x	48,4%	51,6%

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Data dari Tabel 4 terlihat bahwa emiten sektor perbankan di BEI minimal memiliki

jumlah komite audit sebanyak 3 orang dan maksimal 6 orang dan rata-rata sebanyak 4

orang. Sedangkan diatas rata-rata ada sebanyak 48,4% dan dibawah rata-rata sebanyak 51,6%. Jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen minimal adalah sebanyak 60% dan maksimal 100% serta rata-rata 93,23%. Di atas rata-rata ada sebanyak 71% dan dibawah rata-rata sebanyak 29%. Untuk indikator *expert*, minimal memiliki ahli keuangan 2 orang dan maksimal 6 orang serta rata-rata 3 orang dan yang memiliki ahli keuangan di atas rata-rata ada sebanyak 32,26% serta di bawah rata-rata ada sebanyak 67,74%. Dan untuk indikator *meetings*, minimal telah melakukan *meeting* sebanyak 1 kali dan maksimal 37 kali dan rata-rata 12 kali. Sedangkan yang diatas rata-rata ada sebanyak 48,4% dan dibawah rata-rata sebanyak 51,6%.

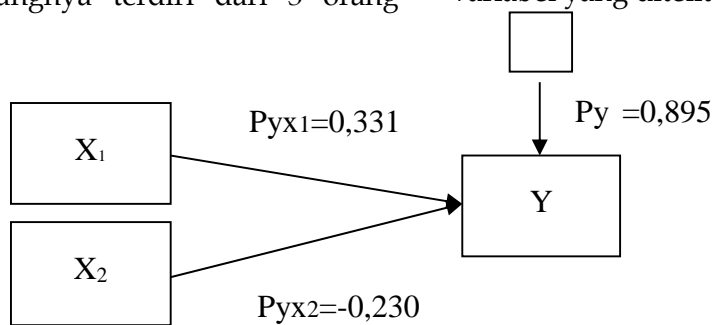
Tabel 4 menunjukkan bahwa emiten sektor perbankan di BEI semuanya telah memiliki komite audit dan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor KEP-41/PM/2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mana emiten wajib memiliki komite audit. Dan jumlah anggota komite audit bagi emiten Bursa Efek Indonesia juga telah sesuai dengan peraturan, yaitu Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 menyebutkan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang

dan sekurang-kurangnya 1 diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Hal ini sejalan dengan FCGI (2003); SOA (2002); Sawyers *et al.*, (2005); Boynton, *et al.*, (2006). Sawyers *et al.*, (2005) menambahkan bahwa komite audit harus dapat memahami fungsi dari komite audit, yaitu salah satunya mengadakan rapat untuk membahas aktivitas pengendalian operasi perusahaan dan khususnya proses penyusunan laporan keuangan yang dihitung dengan jumlah dan lamanya rapat.

Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap *Discretionary Accruals*

Secara diagram bentuk struktur variabel dewan komisaris dan komite audit terhadap *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia dapat digambarkan pada gambar 2, selanjutnya pengaruh dewan komisaris (X_1) dan komite audit (X_2) terhadap *Discretionary accrual* (Y) dapat dilihat pada tabel 5.

Besarnya pengaruh dewan komisaris (X_1) dan komite audit (X_2) terhadap *Discretionary accrual* (Y) secara simultan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,105 atau sebesar 10,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pengaruh variabel dewan komisaris (X_1) dan komite audit (X_2) terhadap *discretionary accruals* (Y) adalah sebesar 10,5% sedangkan sisanya sebesar 89,5% ($1-R^2$) ditentukan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.



Sumber: Analisis Penulis

Gambar 2.
Diagram Jalur Pengaruh Dewan Komisaris (X_1) dan Komite Audit (X_2) terhadap *Discretionary Accrual* (Y)

Tabel 5
Pengaruh Dewan Komisaris (X_1) dan Komite Audit (X_2)
Terhadap *Discretionary Accruals* (Y)

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh
Dewan Komisaris (X_1)	0,331	0,1096
Komite Audit (X_2)	-0,230	0,0529

$R^2 = 0,105$

Sumber: Data Olahan Penulis (SPSS)

Rendahnya pengaruh secara simultan variabel dewan komisaris (X_1) dan komite audit (X_2) terhadap *discretionary accruals* (Y) yaitu sebesar 10,5% mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi *discretionary accruals*. Faktor lain tersebut adalah seperti kepemilikan manajerial (San Ham, 2005), kepemilikan institusional, pasar modal, *block holders* dan pasar tenaga kerja manajerial Agrawal dan Knoeber (dalam Makhdalena, 2012b), kompensasi CEO Murphy (dalam Makhdalena, 2012b).

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel dewan komisaris (X_1) dan komite audit (X_2) secara bersama-sama terbukti dapat mempengaruhi besaran *discretionary accruals*. Dan hal ini didukung dengan Tabel 2, yaitu indeks *discretionary accruals* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia rata-rata mendekati nol (0), yaitu sebesar 0,04411. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia telah menuju keperbaikan. Selanjutnya pembahasan secara parsial pengaruh masing-masing variabel dewan komisaris dan komite audit terhadap *discretionary accruals* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap *discretionary accruals* (Messier *et al.*, 2006; Boynton *et al.*, 2006; Sawyer *et al.*, 2005; Makhdalena, 2012b; Peasnell *et al.*, 2004; Xie *et al.*, 2003; Klein, 2002; Chtourou *et al.*, 2001; dan Lorsch, 2000).

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Discretionary Accrual*

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris terbukti dapat mempengaruhi besaran *discretionary accrual* pada sektor perbankan yang listing di BEI, yaitu sebesar 0,10956 atau 10,956%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *discretionary accruals* (Rezaei dan Roshani, 2012; Mohammad *et al.*, 2012; Principe dan Yosef, 2011; Cornett *et al.*, 2009; OECD, 2004; Peasnell *et al.*, 2004; Klein, 2002; Chtourou *et al.*, 2000 dan Moenaf, 2000).

Dewan komisaris sebaiknya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan pemahaman masalah keuangan perusahaan, termasuk membaca laporan keuangan (Moenaf, 2000) dan salah satu fungsi kunci dewan komisaris harus dapat meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi (OECD, 2004). Selanjutnya agar dewan komisaris dapat lebih efektif, maka sebaiknya anggota dewan komisaris lebih banyak yang berasal dari luar perusahaan dan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan agar anggota dewan dapat lebih independen dalam mengawasi manajemen (Lorsch, 2000).

Rezaei dan Roshani (2012) melakukan penelitian di Iran dengan menguji pengaruh proporsi anggota komisaris independen terhadap *discretionary accruals*. Rezaei dan Roshani (2012) membuktikan bahwa proporsi anggota komisaris independen dapat mempengaruhi *discretionary accruals*. Penelitian yang dilakukan oleh Cornett *et al.*,

(2009) di perusahaan perbankan di Amerika Serikat menemukan bahwa komisaris independen berhubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Penelitian yang dilakukan oleh Prencipe dan Yosef (2011) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *earnings management*. Sedangkan Mohammad *et al.*, (2012) menemukan bukti bahwa *meeting* yang dilakukan dewan dengan CEO pada perusahaan memiliki hubungan negatif dengan aktivitas *earnings management*.

Hasil penelitian Liu dan Lu (2007) yang menguji hubungan komisaris independen dengan *discretionary accruals* dan hasilnya menemukan bukti bahwa komisaris independen berhubungan negatif dengan *discretionary accruals*. Klein (2002) yang menguji hubungan antara *earnings management* dengan karakteristik *board of directors* menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi *board of directors* dengan *discretionary accruals*. Penelitian Klein (2002), membuktikan bahwa struktur dewan yang lebih independen dari CEO lebih efektif memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Peasnell *et al.* (2000) menunjukkan bahwa proporsi *outside director* berpengaruh negatif terhadap *earnings management* yang diukur dengan *working capital accruals*.

Chtourou *et al.*, (2001) yang menemukan bukti bahwa peran dewan berhubungan negatif dengan *abnormal accrual*. Peasnell *et al.* (2004) menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar, dewan komisaris merupakan bagian yang penting dari proses pelaporan keuangan. Timbulnya *earnings management* pada perusahaan-perusahaan di Inggris tergantung pada pengawasan dewan. Peasnell *et al.* (2004) menemukan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi *outsider director* tinggi berhubungan dengan menurunnya *income-increasing (earnings management)*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhdalena (2012a) pada emiten manufaktur di Bursa Efek

Jakarta yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti berhubungan secara signifikan dengan *discretionary accruals*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Discretionary Accruals

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa komite audit terbukti berpengaruh terhadap *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 0,0529 atau 5,29%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *discretionary accrual* (Alkdai dan Hanefah, 2012; Boynton, *et al.*, 2006; Chtourou *et al.*, 2001; Xie, 2001; Klein, 2002; Sawyer *et al.*, 2005; Braiotta dan Zhou, 2006; FCGI, 2001).

Komite audit memiliki dampak yang besar terhadap *discretionary accruals proxy* dari *earnings management* (Boynton *et al.*, 2006). Faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah independensi komite dari manajemen dan pengalaman dari anggota. Komite audit yang hanya terdiri dari dewan yang berasal dari luar perusahaan dan pengalaman dari anggota dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan tujuan pelaporan keuangan suatu perusahaan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap kekeliruan pelaporan keuangan. Dewan direksi telah meningkatkan pengakuan terhadap nilai komite audit sebagai instrumen pengendalian dan sebagai alat untuk memperbaiki kualitas praktik pelaporan keuangan (Sawyer *et al.*, 2005). Tanggungjawab komite audit adalah mengenai tiga hal, yaitu (1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*); (2) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*); (3) Pengendalian Perusahaan (*Corporate Control*) (FCGI, 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Alkdai dan Hanefah (2012) di Malaysia membuktikan bahwa jumlah komite audit berhubungan dengan *discretionary accruals* tetapi tidak signifikan, sedangkan independen komite audit signifikan berhubungan

negatif dengan *discretionary accruals*. Dari penelitian Chtourou *et al.*, (2001) menjelaskan praktik *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh pada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka menemukan bukti bahwa beberapa praktik *corporate governance* (komite audit dan dewan komisaris independen) dapat mengurangi *discretionary accruals*.

Komposisi dari komite audit, latar belakang keuangan dari komite audit, frekuensi pertemuan dari komite audit, aktivitas dan pengalaman keuangan dari anggota komite audit merupakan faktor penting yang dapat menghambat *discretionary accruals* (Xie, 2001). Klein (2002) menjelaskan ada hubungan negatif antara *audit committee independence* dengan *abnormal accruals* (*proxy* dari *earnings management*). Jadi independensi dari komite audit dapat mengurangi *earnings management*. Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan (2005) pada perusahaan yang *listed* di NYSE, AMEX dan OTC dengan menggunakan regresi menyimpulkan bahwa independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dari komite audit berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah *Internal Control*. Dan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Braiotta dan Zhou (2006) pada perusahaan yang *listing* di NASDAQ dengan memakai regresi menyimpulkan bahwa pengalaman dari komite audit berhubungan dengan *earnings management* (*discretionary accruals*), dimana pengalaman dari komite audit dapat mengurangi *discretionary accruals*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhdalena (2011) pada emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta yang menyatakan bahwa komposisi komite audit dengan indikator jumlah anggota komite audit, anggota yang berasal dari komisaris independen dan anggota yang memiliki

keahlian keuangan tidak signifikan berhubungan dengan *discretionary accruals*.

Besarnya pengaruh komite audit terhadap *discretionary accrual* kecil, yaitu hanya sebesar 5,29%. Kecilnya pengaruh komposisi komite audit terhadap *discretionary accrual* disebabkan karena (1) keberadaan komite audit bukan untuk menegakkan *corporate governance* tetapi hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada (Nur Sodik dalam KNKCG, 2002); (2) Anggota komite audit tidak bekerja *full-time* pada perusahaan yang mengangkat mereka akibatnya anggota komite audit tidak banyak waktu untuk mengamati kebenaran dan kewajaran laporan keuangan hal ini ditandai dengan masih adanya *discretionary accruals* pada semua populasi di sektor perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. SOA (2002) telah mewajibkan perusahaan *public* di Amerika Serikat untuk mewajibkan komite audit bekerja *full-time* pada perusahaan yang mengangkat mereka (Aldrige, 2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian serta analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Jadi, dengan bersinerginya dewan komisaris dan komite audit dapat menurunkan besaran *discretionary accrual*. Kecilnya pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap *discretionary accrual* secara simultan disebabkan banyaknya faktor lain yang mempengaruhi *discretionary accrual*, seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pasar modal, *block holders* dan pasar tenaga kerja manajerial.

Adapun pengaruh masing-masing variabel independen (dewan komisaris dan komite audit) terhadap *discretionary accruals* adalah sebagai berikut: (a) dewan komisaris berpengaruh terhadap *discretionary accrual*.

Artinya dewan komisaris dapat mempengaruhi besaran *discretionary accruals* yang terjadi pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Dewan komisaris pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia dapat bekerja sebagai mekanisme *corporate governance* yang berfungsi untuk memonitor perilaku manajemen yang berbentuk *discretionary accruals*; (b) komite audit berpengaruh sangat kecil terhadap *discretionary accrual* pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit yang ada pada emiten sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia bukan untuk menegakkan *corporate governance* tetapi hanya untuk memenuhi regulasi dan komite audit tidak bekerja *full-time* di perusahaan yang mengangkat mereka sehingga tidak dapat mendeteksi adanya transaksi yang tidak wajar yang terjadi pada perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk lebih mendorong dan membangun praktik *corporate governance*, diberikan beberapa saran bagi pengembangan ilmu, yaitu: (1) peneliti, disarankan jika memakai variabel *discretionary accrual* disarankan untuk melihat variabel lain yang mempengaruhi *discretionary accrual* selain dewan komisaris dan komite audit seperti kepemilikan manajerial, kompensasi CEO, kepemilikan institusional, pasar modal, pasar tenaga kerja manajerial dan *block holders*; (2) akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengajaran materi akuntansi keuangan terutama pembahasan tentang materi *discretionary accrual* harus lebih diperhatikan. Dan juga mungkin untuk memberikan mata kuliah khusus tentang *corporate governance*.

Sedangkan saran operasional yang mampu diberikan adalah (1) *regulator*, disarankan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meminimalisasi *discretionary accrual* seperti mewajibkan emiten agar komite audit bekerja *full-time* diperusahaan

yang mengangkat mereka supaya dapat mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar; (2) perusahaan, diharapkan kesadaran akan pentingnya komite audit. Keberadaan komite audit jangan hanya sekadar untuk memenuhi regulasi tetapi harus untuk menegakkan *corporate governance*. Jadi komite audit harus profesional dan kompeten, serta mewajibkan komite audit dapat bekerja *full-time* di perusahaan agar dapat mendeteksi transaksi yang tidak wajar yang terjadi di perusahaan. Hal ini penting karena *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kinerja keuangan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan, ini akan meningkatkan kepercayaan investor. Jika kepercayaan investor meningkat, harga saham juga akan meningkat yang akhirnya dapat dengan mudah memperoleh modal dengan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrige, E. J. dan S. Sutojo. 2005. *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Penerbit Damar Mulia. Jakarta.
- Alkdai, H. K. H. dan M. M. Hanefah. 2012. Audit Committee Characteristics and Earnings Management in Malaysian Shariah-Compliant Companies. *Business and Management Review* 2(2): 52-61.
- Bapepam. 2000. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-32/PM/2000. *Tentang Benturan Kepentingan*.
- . 2000. Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000. *Tentang Keharusan Pembentukan Komite Audit*.
- . 2003. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003. *Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit*.
- . 2004. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004. *Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Bursa Efek Jakarta. 2000. Peraturan Pencatatan Efek. Nomor I-A *Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat*

- Ekuitas di Bursa*. Keputusan Direksi BEJ No. 315/BEJ/06/2000.
- Boynton, W. C., N. J. Raymon, dan W. G. Kell. 2006. *Modern Auditing*. 7th ed. Irwin Inc. USA.
- Braiotta, J. dan Louis. 2004. *The Audit Committee Handbook*. 4th ed. Wiley. New York.
- Cheung, S. 2004. *Corporate Governance in Hongkong, Cina; Rising to Challenges of Globalization*. World Bank. Washington DC. USA.
- Chtourou, S. M., J. Bedard, dan L. Courteau. 2001. Corporate Governance and Earnings Management. *Working Paper*. Universite Laval. Canada.
- Cornett, M. M., J. J. McNutt, dan H. Tehranian. 2009. Corporate Governance and Earnings Management at Large U.S. Bank Holding Companies. *Journal of Corporate Finance* 15: 412-430.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid 1. Edisi ke-2. Jakarta.
- . 2003. *Good Corporate Governance*. Jakarta.
- Han, S. 2005. Ownership Structure and Quality of Financial Reporting. *Dissertation*. University of Illinois at Urbana-Champaign.
- ICMD. 2011. *Indonesian Market Directory Indonesia Capital Market Directory*. Indonesian Stock Exchange (IDX). Jakarta.
- Klein. 2002. Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics* 33(3): 375-400.
- Krishnan, J. 2005. Internal Control Quality and Audit Committee Quality: An Empirical Analysis. *The Accounting Review* 80(2): 649-675.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). 2002. *The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Jakarta.
- Liu, Q. dan Z. Lu. 2007. Corporate Governance and Earnings Management in the Chinese Listed Companies: A Tunneling Perspective. *Journal of Corporate Finance* 13: 881-906.
- Lorsch. 2000. Empowering the Board. Harvard Business Review on Corporate Governance. *The Harvard Business Review*.
- Makhdalena. 2011. Hubungan Komposisi Komite Audit dengan Earnings Management. *Jurnal Akuntansi* 15(2): 138-148.
- . 2012a. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Earnings Management. *Jurnal Akuntansi* 16(1): 71-82.
- . 2012b. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit Terhadap Earnings Management. *Jurnal Akuntansi* 16(3): 336-349.
- Messier, W. F. J., S. M. Glover, dan D. F. Prawitt. 2006. *Auditing & Assurance Services A Systematic Approach*. 4th ed. McGraw-Hill Irwin. USA.
- Mohamad, S. H. M., M. A. R. Hafiz, dan A. M. S. Fekri. 2012. Corporate Governance and Earnings Management in Malaysian Government Linked Companies: the Impact of GLCs' Transformation Policy. *Asian Review of Accounting* 20(3): 241-258.
- Moenaif, H. R. 2000. *Dewan Komisaris: Peranannya sebagai Organ Perseroan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- OECD. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. The OECD. Paris.
- Owen, H. J. 2003. *Royal Commission into the Failure of HIH Insurance, Part Three*. Australian Royal Commission. Australia.
- Peasnell, K.V., P.F. Pope, dan S. Young. 2001. Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals? *Accounting and Business Research* 30: 303-326.
- Prencipe, A. dan S. B. Yosef. 2011. Corporate Governance and Earnings Management in Family-Controlled Companies. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 26(2): 199-227.

- Rezaei, F. dan M. Roshani. 2012. Efficient or Opportunistic Earnings Management with Regards to the Role of Firm Size and Corporate Governance Practices. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 3(9): 1312-1322.
- Sawyer, L. B., M. A. Dittenhoter, dan J. H. Scheiner. 2005. *Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing*. 5th ed. Altamonte Springs. The Institute of Internal Auditors, Inc. Florida.
- Sarbanes-Oxley Act (SOA). 2002. An Act. 107th Congress. USA.
- Scott, W. R. 2006. *Financial Accounting Theory*. International ed. Prentice Hall. New Jersey.
- Solomon, J. dan A. Solomon. 2003. *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Son. UK.
- Syakhroza, A. 2004. Model Komisaris untuk Efektivitas GCG di Indonesia, *Majalah Usahawan* Mei 5(33).
- Xie, B., Davidson, N. Wallace, dan P. J. Dadalt. 2001. Earnings Management and Corporate Governance: The Roles of the Board and the Audit Committee. *Working Paper Series*.